

NASKAH PUBLIKASI

TINJAUAN TENTANG PIDANA PENJARA SEBAGAI UPAYA

PENANGGULANGAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN ANAK



Diajukan oleh :

TINNERHA SISPAYERTY SITOMPUL

NPM : 080509862

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

**HALAMAN PENGESAHAN
NASKAH PUBLIKASI**

**TINJAUAN TENTANG PIDANA PENJARA SEBAGAI UPAYA
PENANGGULANGAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN ANAK**



Diajukan Oleh :

TINNERHA SISPAYERTY SITOMPUL

N P M : 08 05 09862
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 1 Desember 2014**

Dosen Pembimbing,

P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS

**Mengetahui
Dekan,**

DR. G. Sri Nurhartanto, SH., LLM

- I. Judul** : Tinjauan Tentang Pidana Penjara Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Anak.
- II. Nama** : Tinnerha Sispayerty Sitompul,P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS.
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

criminalization of children who commit criminal acts often lead to festive and long debate. Punishment has negative consequences for the criminal subject. Criminal punishment to naughty children, tend to be detrimental to the mental development of the child in the future. The application of the criminal to juvenile offenders is expected to provide deterrence to other children and the general public not to do evil. But this purpose is sometimes fail, because offenders tend to repeat the crime (recidivism). this giving rise to debate as to whether the imposition of imprisonment of a child is a must. then, Based on the background of the problem, the purpose of this essay is to investigate and obtain information about whether the imposition of imprisonment to a child who commits a crime is a necessity?. This research is normative research, made by reviewing analyzing secondary data in the form of legal materials, especially primary legal materials and secondary legal materials tp understand the law as a set of rules or norms in the system of positive law governing the human life. The conclusion of the research indicate that the results of this research are expected to provide benefits about observation imprisonment in an effort to tackling crimes who as child is the doer of crime.

Keywords : imprisonment ; crime; child ; prevention.

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sering menimbulkan perdebatan yang ramai dan panjang, karena masalah ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut diri pelaku maupun masyarakat.

Pemidanaan mempunyai akibat negatif bagi yang dikenai pidana. Dalam penjatuhan pidana terhadap anak hakim harus

menggunakan dasar pertimbangan yang rasional agar dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu dari perspektif ilmu peminatan meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal, cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang.¹ Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat).

Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya sama dengan penerapan sanksi pidana yang ditetapkan pada orang dewasa yang melakukan tindak pidana yang sama, yaitu pada hakikatnya siapa yang melakukan tindakan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan aturan yang ada dan berlaku disuatu wilayah harus menerima sanksi sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan orang yang bersangkutan karena tujuan pidana merupakan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan antara kejahatan anak dan kejahatan pada umumnya yang dilakukan oleh orang dewasa hanya terletak pada umur. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa:

“ anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana anak juga menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang

¹Hadisuprpto Paulus. 2003, *Menemukan Upaya Mengatasi Tindak Kekerasan*, Documentation, Fakultas Ilmu Hukum. hlm. 32.

selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Penerapan pidana kepada anak pelaku kejahatan diharapkan dapat memberikan pencegahan kepada anak-anak lain dan masyarakat secara umum untuk tidak berbuat kejahatan. Tujuan ini terkadang mengalami kegagalan, karena pelaku kejahatan cenderung akan mengulangi kembali kejahatan yang telah ia lakukan (*residivis*). Untuk itu pemidanaan harus mengandung unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, edukatif dan juga mengandung unsur keadilan yang dapat membuat pelaku sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan dirasakan adil oleh korban ataupun masyarakat.²

Saat ini, anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana belum mendapatkan haknya secara penuh dari aparat penegak hukum di Indonesia sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi anak. Hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan sering memilih pidana penjara sebagai pidana yang tepat untuk anak. Dalam mengadili perkara yang terdakwa anak, diperlukan informasi mengenai keadaan serta kepribadian ataupun latar belakang anak. Informasi tentang latar belakang tersebut akan sangat membantu hakim dalam menjatuhkan putusannya, termasuk putusan yang berupa pemidanaan yang diharapkan

² Barda Namawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm . 87.

akan bermanfaat bagi kesejahteraan dan perkembangan anak di masa depannya.

Menurut H.L Packer yang dikutip dalam buku Barda Nawawi Arief bahwa usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan pengenaan hukum pidana, merupakan problem sosial yang memiliki dimensi hukum yang penting, artinya sampai saat ini masih dipersoalkan peranannya karena dengan mengandalkan pemberian pidana tidak akan dapat menumbuhkan suatu kesadaran yang tumbuh dalam diri seseorang, justru dengan pidana efek yang timbul hanyalah perasaan takut saja akan hukuman yang akan dijatuhkan.³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Apakah penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan kejahatan merupakan suatu keharusan ?

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

³ <http://elfamurdiana.blogspot.com/2009/02/artikelku.html>

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRACT

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

PERNYATAAN KEASLIAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, serta batasan konsep. Disamping itu dalam bab ini juga menguraikan metode tentang jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, lokasi penelitian, narasumber, serta metode analisis data dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : PENJATUHAN PIDANA PENJARA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN ANAK

Bab ini berisi tentang uraian tinjauan tentang pidana penjara, tinjauan tentang penanggulangan kejahatan, tinjauan tentang anak, hasil penelitian.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini penulis sajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penulisan skripsi ini dan memberikan saran-saran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan hukum.

LAMPIRAN

VII. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan teori hukum maka penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak tidaklah merupakan suatu keharusan karena banyaknya dampak negatif dan kerugian dari penjatuhan pidana penjara terhadap anak. Penahanan anak bukan merupakan jalan utama dalam rangka perbaikan moral anak yang melakukan tindak pidana dan dari sudut politik kriminal, penggunaan hukum pidana tidak dapat dinyatakan sebagai suatu keharusan atau sebaliknya dinyatakan sebagai sesuatu yang harus di tolak atau dihapuskan sama sekali.

VIII. Daftar Pustaka

Buku :

Hadisuprpto Paulus. 2003, *Menemukan Upaya Mengatasi Tindak Kekerasan*, Documentation, Fakultas Ilmu Hukum.

Barda Namawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Website :

<http://elfamurdiana.blogspot.com/2009/02/artikelku.html>

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.